

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan dilakukan ini merujuk pada beberapa penelitian yang terdahulu yang telah dilakukan:

2.1.1 Febriyanti (2014)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan pada CV. Anugrah Multi Sarana. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu mengumpulkan data, mengelolah data, menganalisis data, kemudian mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan, mengelolah, dan menganalisis pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan yang kemudian akan menyimpulkan fakta yang didapatkan dari analisis tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu CV. Anugrah Multi Sarana pada tahun 2011-2012, terdapat perbedaan tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23 peraturan perundang-undangan perpajakan No.36 Tahun 2008 sehingga terdapat selisih atas perbedaan perhitungan tersebut.

Persamaan : menganalisa penerepan pemotongan pajak penghasilan di bidang jasa.

Perbedaan : peneliti terdahulu menggunakan objek penelitian pada usaha jasa perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan dan menggunakan PPh Pasal 23, sedangkan peneliti sekarang menggunakan objek penelitian pada usaha jasa konstruksi dan menggunakan PPh pasal 4 ayat 2 (Final) sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) serta menambahkan aspek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di dalamnya.

2.1.2 Geruh (2013)

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui penerapan UU Nomor. 42 tahun 2009 PPN dan PPnBM terhadap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha menghasilkan Barang Kena Pajak. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian pada PT. Tiga Karya Wenang Manado merupakan perusahaan yang bergerak disegala bidang menjual produk yang merupakan Barang Kena Pajak. Sebagai Pengusaha kena pajak PT Tiga Karya Wenang wajib melaksanakan penerapan PPN sesuai dengan UU. Penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada perusahaan tersebut sudah sesuai dengan UU Nomor. 42 tahun 2009 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM. Dimana tarif yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak 10% dari harga jual produk. Yang menjadi Dasar Pengenaan PPN pada PT. Tiga Karya Wenang Manado adalah harga jual produk yang dalam perusahaan lebih dikenal dengan istilah Harga Pengikatan. Perusahaan menggunakan metode pencatatan PPN yaitu metode Akrua Basis. Pelaksanaan, pemungutan dan perhitungan PPN yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak sudah benar.

Persamaan : meneliti tentang bagaimana cara pemungutan dan perhitungan PPN.

Perbedaan : peneliti terdahulu menggunakan objek penelitian pada perusahaan dagang, dan peneliti sekarang menggunakan objek penelitian pada usaha jasa konstruksi serta menambahkan aspek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 (PPh Final) sebagai dasar pemotongan PPh.

2.1.3 Nelwan (2013)

Penelitian dilakukan pada Bank Prisma Dana yang merupakan salah satu PT. BPR yang ada di Sulawesi Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 23 pada Bank Prisma Dana Manado. Metode yang digunakan analisis deskriptif, dimana dilakukan pengamatan dan wawancara secara langsung pada perusahaan yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan, Bank Prisma Dana telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bank Prisma Dana sepenuhnya menerapkan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi, Bank Prisma Dana harus terus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23.

Persamaan : menganalisa penerapan pemotongan pajak penghasilan atas jasa.

Perbedaan : peneliti terdahulu menggunakan objek penelitian pada perusahaan bank yang menerapkan PPh Pasal 23 sebagai dasar pemotongan Pajak Pertambahan Nilai, dan peneliti sekarang menggunakan objek penelitian pada

usaha jasa konstruksi yang menerapkan PPh Pasal 4 ayat 2 (PPh Final) sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan pada usaha jasa konstruksi serta menambahkan aspek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di dalamnya.

2.1.4 Fharadilah Putri (2013)

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT Badak NGL belum sepenuhnya menerapkan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan perpajakan berlaku. Karena ada diterbitkannya surat himbaun untuk membetulkan SPT Masa PPN dan dikeluarkannya Surat Tagihan Pajak serta masih ada keterlambatan dalam melaporkan PPN. Oleh karena itu, penulis memberikan saran agar dalam menerbitkan Faktur Pajak Standar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku mengenai tata cara pengisian Faktur Pajak Standar.

Persamaan : menganalisa penerapan pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Perbedaan : peneliti terdahulu menggunakan objek penelitian pada perusahaan jasa gas alam cair sedangkan peneliti sekarang menggunakan objek penelitian pada usaha jasa konstruksi dan menambahkan aspek pemotongan pada Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 (PPh Final).

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Soeparman Soemahamidjaja pajak adalah iuran wajib yang berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma

hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.(Waluyo, 2011: 2)

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011: 1). Definisi lain mengenai pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk pembiayaan pengeluaran rutin dan surplusnya yang digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk menbiayaan public investment.

Menurut S.I Djajadiningrat pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara angung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Siti Resmi, 2010: 1).

Menurut N.J Feldmann pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk menuntut pengeluaran-pengeluaran secara umum.(Siti Resmi, 2011: 2)

Beberapa definisi di atas terdapat persamaan pandangan prinsip mengenai pajak. Perbedaan mengenai beberapa definisi tersebut hanya pada penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja. Beberapa pendapat tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang.
- 2) Tidak ada timbal jasa (Kontraprestasi) secara langsung.
- 3) Dapat dipaksakan.
- 4) Hasilnya untuk membiayai pembangunan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

2.2.2 Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak atau suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.

2.2.3 Kewajiban Perpajakan PPh Badan

Sesuai dengan Undang-undang perpajakan Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang merupakan subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara

2.2.4 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c) laba;
- d) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h) royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

- j) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k) keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l) keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n) premi asuransi;
- o) iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q) penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r) imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s) surplus Bank Indonesia.

2.2.5 Subjek Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Yang menjadi Subjek Pajak adalah:

1. Orang Pribadi;
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
3. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi,

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

2.2.6 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 pasal 17 tentang pajak penghasilan diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif ini menjadi 25% berlaku sejak tahun pajak 2010.

Tarif pajak penghasilan badan tahun 2010 bagi wajib pajak badan dalam negeri yang mempunyai peredaran bruto hingga Rp. 50.000.000.000 (lima Puluh Miliar rupiah). Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dilaksanakan dengan cara self assessment pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak

Badan. Wajib Pajak tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.

Peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah merupakan total atau jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang meliputi:

- a) Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final;
- b) Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final;
- dan
- c) Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

Fasilitas Pasal 31E ayat (1) tersebut bukan merupakan pilihan. Sepanjang akumulasi peredaran bruto sebagaimana di atas tidak melebihi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri wajib mengikuti ketentuan fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Penghitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Jika peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

PPh terutang = 50% X 25% X seluruh Penghasilan Kena Pajak.

2. Jika peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000.000,00, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

- a. $\text{PPh terutang} = 50\% \times 25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas.}$
- b. $\text{PPh terutang} = 25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas}$

2.2.7 Pajak Penghasilan Yang Pengenaannya Bersifat Final

Mengacu pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai penghasilan tertentu yang pengenaan pajaknya diatur dalam peraturan pemerintah. Pertimbangan yang mendasari diberikannya perlakuan tersendiri antara lain adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta perkembangan ekonomi dan moneter.

2.2.8 Beberapa Jenis Penghasilan Yang Pengenaan Pajaknya Bersifat Final

Terdapat beberapa jenis penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah atau Keputusan/Peraturan Menteri keuangan dengan perlakuan yang perlu diperhatikan:

1. Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak digabungkan dengan penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif progresif pada akhir tahun.
2. Jumlah PPh atas penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final tersebut tidak dapat diperhitungkan/dikreditkan dengan PPh yang terutang

atas Penghasilan Kena Pajak yang dikenakan pajak dengan tarif progresif akhir tahun.

3. Biaya /pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final tidak dapat dikurangkan dalam rangka penghitungan Penghasilan Kena Pajak.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, pasal-pasal yang mengatur mengenai jenis penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final terdapat dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 15, Pasal 19 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 ayat (4).

2.2.9 PPh Pasal 4 ayat (2) (PPh Final)

PPh Final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi atau usaha tertentu. Laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih. Beberapa jenis penghasilan yang terdapat didalam PPh Pasal 4 ayat (2) adalah :

1. Bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
2. Hadiah Undian.
3. Penghasilan Bunga dan Diskonto dari Obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan pada perdagangan di Bursa Efek.
4. Penjualan Saham Pendiri dan Bukan Pendiri di Bursa Efek

5. Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
6. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
7. Usaha Jasa Konstruksi yang memenuhi kualifikasi usaha kecil dan nilai pengadaan s.d satu miliar rupiah.
8. Uang pesangon, uang manfaat pensiun. Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua

2.2.10 Kewajiban Pembukuan Pada Wajib Pajak Badan

Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan pasal 28 ayat (1) yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Hal ini jelas diatur dalam undang-undang bahwa wajib pajak badan harus melakukan pembukuan dalam kegiatan usahanya. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang.

2.2.11 Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terdapat dua macam SPT yaitu:

- a) SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
- b) SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

2.2.12 Fungsi SPT

Berikut adalah fungsi surat pemberian, antara lain :

a) Wajib Pajak PPh

Sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- 1) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- 2) penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;
- 3) harta dan kewajiban;
- 4) pemotongan/ pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak.

b) Pengusaha Kena Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- 1) pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran

- 2) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c) Pemotong/ Pemungut Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan

2.2.13 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak tidak Langsung yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai atau transaksi penyerahan barang dan atau jasa kena pajak dalam pendistribusiannya dari produsen dan konsumen.

Disebut pajak tidak langsung karena tidak langsung dibebankan kepada penanggung pajak (konsumen) tetapi melalui mekanisme pemungutan pajak dan disetor oleh pihak lain (penjual). Transaksi penyerahannya bisa dalam bentuk jual-beli, pemanfaatan jasa, dan sewa-menyewa.

Pemungutan, penyeteroran dan pelaporan PPN merupakan kewajiban dari Produsen atau Pedagang yang disebut Pengusaha Kena Pajak (biasa disingkat PKP). Pengusaha Kena Pajak (disingkat PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak.

2.2.14 Barang Kena Pajak (BKP)

Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Barang

Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984.

Yang dimaksud dengan “Barang Kena Pajak Tidak Berwujud” adalah:

- a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta dibidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
- b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah;
- c. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
- d. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada huruf a, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada huruf b, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada huruf c, berupa:
 - 1) Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
 - 2) Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau

radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; dan

3) Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;

e. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (*motion picture film*), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan

f. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut diatas.

2.2.15 Pengecualian Barang Kena Pajak

Pada dasarnya semua barang adalah BKP, kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan dihotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh jasa boga atau catering; dan

- d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi dan lainnya).

2.2.16 Jasa Kena Pajak (JKP)

Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan PPN, berdasarkan Undang-Undang PPN 1984 Contohnya: jasa konstruksi, jasa sewa ruangan, jasa konsultan, jasa perantara.

2.2.17 Pengecualian Jasa Kena Pajak

Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:

- a. Jasa pelayanan kesehatan medis.
- b. Jasa dibidang pelayanan sosial.
- c. Jasa dibidang pengiriman surat dengan perangko.
- d. Jasa keuangan.
- e. Jasa asuransi, yaitu jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.

- f. Jasa dibidang keagamaan.
- g. Jasa pendidikan.
- h. Jasa kesenian dan hiburan meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan.
- i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.
- j. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- k. Jasa tenaga kerja.
- l. Jasa perhotelan.
- m. Jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, antara lain pemberian Izin Mendirikan Bangunan, pemberian Izin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk.
- n. Jasa penyedia tempat parkir, yaitu jasa penyedia tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran.
- o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.
- p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan

- q. Jasa boga atau catering.

2.2.18 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN secara umum yang digunakan sesuai pasal 7 UU 42 tahun 2009 yakni sebesar 10% dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak). Namun, tarif pajak dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan untuk ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak Dikenakan tarif sebesar 0% (nol persen).

2.2.19 Tata Cara Pemungutan, Pelaporan Dan Penyetoran PPN

Pemerintah menetapkan Undang-Undang yang mengatur tentang tata cara pemungutan, pelaporan, dan penyetoran PPN yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang 42 tahun 2009 yaitu :

1. Rekanan wajib membuat Faktur Pajak dan SSP atas setiap penyerahan BKP dan/ atau JKP kepada Badan Usaha Milik Negara.
2. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan.
3. SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 diisi dengan membubuhkan NPWP serta identitas Rekanan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai penyetor atas nama Rekanan.

4. Dalam hal penyerahan BKP selain terutang PPN juga terutang PPnBM, maka Rekanan harus menyantumkan juga jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur Pajak.
5. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukkan sebagai berikut :
 - a. Lembar kesatu untuk Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Lembar kedua untuk Rekanan; dan
 - c. Lembar ketiga untuk Badan Usaha Milik Negara yang dilampirkan pada SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN.
6. SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukkan sebagai berikut :
 - a. Lembar kesatu untuk Rekanan;
 - b. Lembar kedua untuk KPPN melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos;
 - c. Lembar ketiga untuk Rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN;
 - d. Lembar keempat untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos; dan
 - e. Lembar kelima untuk Badan Usaha Milik Negara yang dilampirkan pada SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN.
7. Badan Usaha Milik Negara yang melakukan pemungutan harus membubuhkan cap “Disetor Tanggal” dan menandatangani pada Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 5.

8. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN atau PPN dan PPnB.

Pelaporan dilakukan setiap bulan dan laporan disampaikan ke KPP tempat Badan Usaha Milik Negara terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak, dengan menggunakan formulir “Surat Pembertahuan Masa PPN bagi Pemungut PPN”, dan dilampiri dengan Faktur Pajak lembar ke-3 dan SSP lembar ke-5 dalam hal terdapat pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM.

2.2.20 Pengertian Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya pembangunan nasional. Berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku belum berorientasi baik kepada kepentingan pengembangan jasa konstruksi sesuai dengan karakteristiknya yang mengakibatkan kurang berkembangnya iklim usaha yang mendukung peningkatan daya saing secara optimal, maupun bagi kepentingan masyarakat. Dengan dasar pertimbangan tersebut, akhirnya Pemerintah menetapkan Undang-undang yang mengatur tentang jasa konstruksi yaitu UU No.18 Tahun 1999.

Undang-undang Republik Indonesia No.18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, yang dimaksud dengan jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Bidang usaha jasa konstruksi tersebut mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya.

Perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain. Pelaksanaan konstruksi adalah pemberi jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan suatu hasil yang maksimal. Pengawasan konstruksi adalah pemberi jasa oleh rang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan jasa kontruksi sampai berakhirnya masa kontrak.

2.2.21 Bentuk Usaha Jasa Konstruksi

Bentuk usaha jasa konstruksi berdasarkan UU No.18 Tahun 1999, tentang “Jasa Konstruksi” dapat berbentuk perseorangan atau badan usaha. Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil, berteknologi sederhana dan yang berbiaya kecil. Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Pekerjaan konstruksi yang beresiko besar dan atau berteknologi tinggi dan atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

2.2.22 Penghasilan Perusahaan Jasa Konstruksi

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan konstruksi selain memperoleh penghasilan dari menyediakan jasa konstruksi baik berupa jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksana konstruksi, maupun jasa pengawas konstruksi, perusahaan konstruksi juga mungkin memperoleh penghasilan lain diluar usaha.

1. Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi

Penghasilan utama perusahaan konstruksi tersebut adalah penghasilan dari penyediaan jasa konstruksi, baik jasa perencana konstruksi, jasa pelaksana konstruksi maupun jasa pengawas konstruksi. Untuk perusahaan jasa konstruksi yang memberikan jasa pelaksanaan konstruksi, tetapi didalamnya juga termasuk memberikan jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi, maka jasa konstruksi tersebut tetap diklasifikasikan sebagai jasa pelaksana konstruksi.

2. Penghasilan Luar Usaha Jasa Konstruksi

Selain penghasilan dari memberikan jasa konstruksi terdapat juga penghasilan lain perusahaan jasa konstruksi yang meliputi: Penghasilan sewa alat-alat berat dan mesin-mesin yang menganggur; Penghasilan jasa giro; Penghasilan bunga deposito; dan penghasilan luar usaha lainnya.

2.2.23 Beban Usaha Jasa Konstruksi

1. Beban Dari Usaha Konstruksi

Biaya suatu kontrak konstruksi menurut akuntansi yang terdapat dalam PSAK No.34 terdiri dari:

- A. Biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kontrak meliputi:
- a) Biaya pekerjaan lapangan termasuk penyelia;
 - b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c) Penyusutan sarana dan peralatan yang digunakan dalam kontrak tersebut;
 - d) Biaya pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan kontrak;
 - e) Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - f) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan kontrak tersebut;
 - g) Estimasi biaya pembetulan dan biaya-biaya lain yang mungkin timbul selama masa jaminan; dan
 - h) Klaim dari pihak ketiga.
- B. Biaya-biaya yang dapat didistribusikan ke aktivitas kontrak pada umumnya dan dapat dialokasikan ke kontrak tersebut, meliputi:
- a) Asuransi;
 - b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan kontrak tertentu; dan
 - c) Biaya-biaya overhead konstruksi.
- C. Biaya lain yang secara khusus dapat ditagihkan ke pemberi kerja sesuai isi kontrak (IAI, 2007, p.34.5)

Sedangkan biaya yang tidak dapat di distribusikan ke aktivitas kontrak atau tidak dapat dialokasikan ke suatu kontrak dikeluarkan dari biaya konstruksi. Biaya semacam ini meliputi:

- a) Biaya administrasi umum yang penggantiannya tidak ditentukan dalam kontrak;
- b) Biaya pemasaran umum;
- c) Biaya riset dan pengembangan yang penggantiannya tidak ditentukan dalam kontrak; dan
- d) Penyusutan sarana dan peralatan menganggur yang tidak digunakan pada kontrak tertentu. (IAI, 2007, p.34.6)

2. Beban Luar Usaha jasa Konstruksi

Beban luar usaha jasa konstruksi merupakan beban-beban yang timbul untuk mendapatkan pendapatan luar usaha konstruksi, dapat berupa biaya pemeliharaan peralatan yang disewakan, biaya administrasi bank sehubungan dengan pemeliharaan pendapatan jasa giro dan pendapatan deposito, serta beban usaha lainnya.

Definisi beban menurut akuntansi yang terdapat dalam Standar Akuntansi Keuangan yaitu: “Penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. (IAI, 2007, p.18). Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa segala pengeluaran yang menyebabkan penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode

akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal merupakan beban. Jadi biaya pemeliharaan, biaya administrasi bank sehubungan dengan pemeliharaan pendapatan jasa giro dan bunga deposito merupakan beban dalam laporan keuangan komersial perusahaan.

2.2.24 Kewajiban Perpajakan Jasa Konstruksi

Dalam ketentuan perpajakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tatacara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya. Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan. Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak

Penghasilan yang bersifat final. Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final :2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa dengan kualifikasi usaha kecil;

- a. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
- b. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
- c. 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan
- d. 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud diatas, dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak; atau disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal Pengguna Jasa bukan merupakan pemotong pajak.

Besarnya, Pajak Penghasilan yang dipotong, adalah jumlah pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan. Sedangkan besarnya. Pajak Penghasilan yang disetor sendiri adalah jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan. Jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran

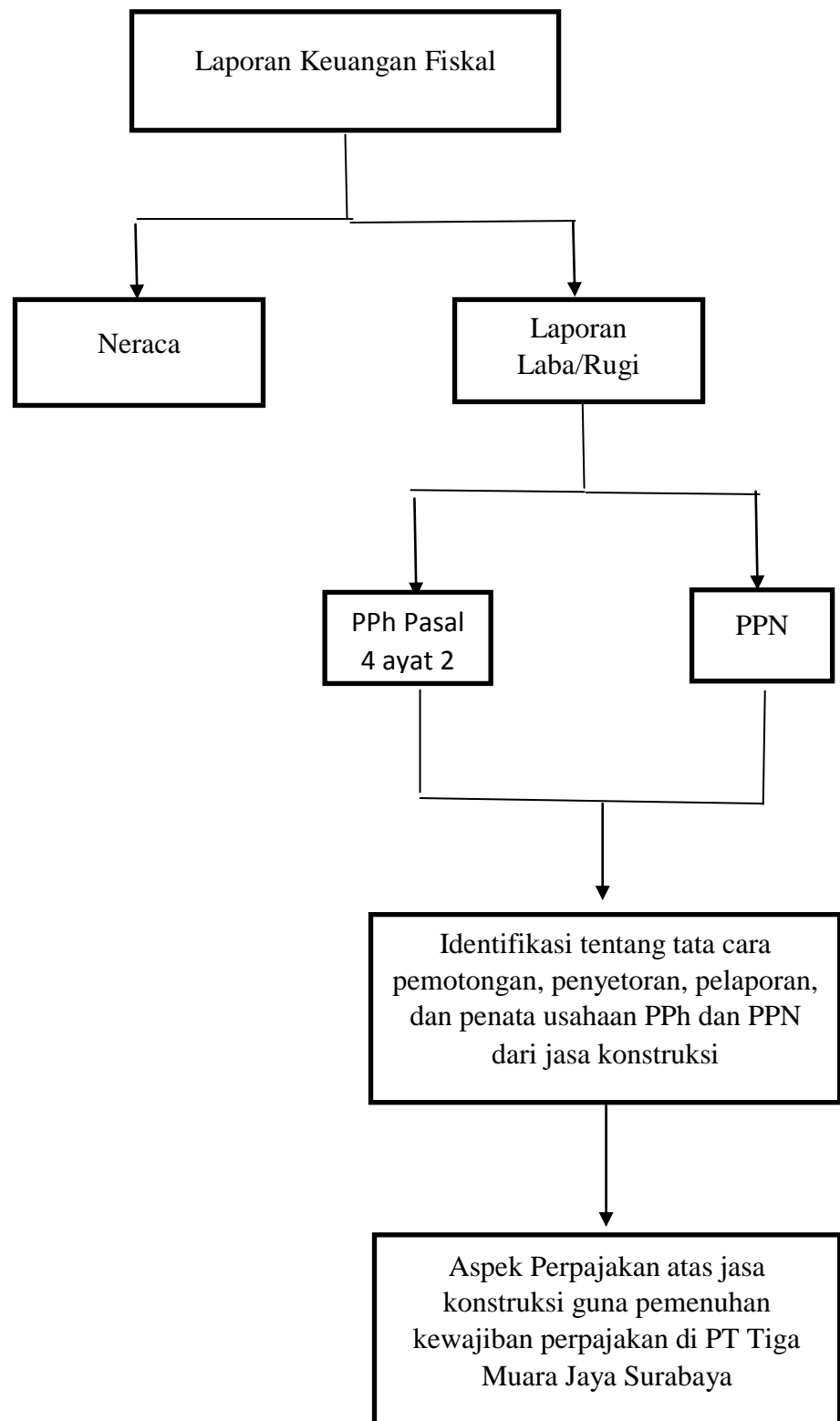
sebagaimana dimaksud diatas, merupakan bagian dari Nilai Kontrak Jasa Konstruksi.

Pajak Penghasilan yang dipotong oleh Pengguna Jasa disetor ke kas negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak. Pajak Penghasilan yang disetor sendiri oleh Penyedia Jasa ke kas negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran dalam hal Pengguna Jasa bukan merupakan pemotong pajak.

Tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka saat penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pembayaran Pajak Penghasilan atau Penyetoran Pajak Penghasilan dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.

Pemotong Pajak Penghasilan memberikan tanda bukti pemotongan kepada Penyedia Jasa yang dipotong Pajak Penghasilan setiap melakukan pemotongan. Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah bulan dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Masa sebagaimana bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka saat penyampaian Surat Pemberitahuan Masa dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan

Dari rancangan kerangka pemikiran diatas dapat dijelaskan :

Tahap awal memulai penelitian ini, peneliti mengumpulkan beberapa sumber dokumen dari laporan keuangan perusahaan yang berkaitan dengan proyek konstruksi yang ditangani oleh perusahaan. Dari data yang ada, peneliti akan menghitung Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang harusnya dipotong dari penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan sesuai dengan PP Nomor 51 Tahun 2008 dan Peneliti akan menghitung Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak maupun Barang Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Menentukan Kewajiban PPh badan dan PPN pada perusahaan jasa konstruksi PT Tiga Muara Jaya Surabaya.

2.4 Proposisi Penelitian

Proposisi adalah bagian yang mengarahkan perhatian peneliti kepada sesuatu yang harus diteliti dalam ruang lingkup penelitiannya. Adapun proposisi dalam penelitian ini adalah Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan PPN yang dikenakan pada imbalan yang diperoleh ataupun diterima oleh Wajib Pajak atas penjualan jasa konstruksinya. Pemotongan pajak tersebut, akan berpengaruh pada Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan.